



Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif PPN dari 10% menjadi 11% terhadap Konsumsi Rumah Tangga dan Inflasi di Indonesia Periode 2019–2025

Jihandra Masitho Dewi^{1*}, Mutiara Aulia², Dinda Cahyadewi³, Amanda Ratnadewati⁴,
Habibah Putri Mahliza⁵, Ahmad Setiawan Nuraya⁶

¹⁻⁶Manajemen, STIE Indonesia Banking School, Indonesia

*Penulis Korespondensi: jihann.draa03@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the differences in household consumption and inflation before and after the Value Added Tax (VAT) rate increase from 10% to 11%, as well as the effect of the VAT rate increase on household consumption and inflation in Indonesia. The data used is quarterly time series data for the 2019–2025 period obtained from the Central Statistics Agency (BPS), Bank Indonesia (BI), and the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. The analytical methods used in this study include descriptive statistical analysis, normality tests, independent sample t-tests, and simple linear regression. The difference tests were conducted using original household consumption and inflation data to examine differences before and after the VAT rate increase. Meanwhile, the regression analysis used growth data to examine the effect of the VAT rate change on household consumption and inflation. The results show a significant difference in household consumption and inflation before and after the 11% VAT rate increase at the 10% significance level. The simple linear regression results indicate that the VAT rate increase has no significant effect on household consumption, but does have a significant effect on inflation at the 10% significance level. These findings indicate that the VAT rate increase has a greater impact on inflation than on household consumption. This indicates that Indonesian consumption tends to remain stable despite the VAT rate increase, as consumption is still dominated by primary needs, which are inelastic.*

Keywords: *Fiscal Policy; Household Consumption; Inflation; Tax Rate Increase; Value Added Tax (VAT).*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan konsumsi rumah tangga dan inflasi sebelum dan sesudah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11%, serta menganalisis pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap konsumsi rumah tangga dan inflasi di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data time series triwulanan periode 2019–2025 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis statistik deskriptif, uji normalitas, uji beda menggunakan Independent Sample t-test, dan regresi linier sederhana. Uji beda dilakukan menggunakan data asli konsumsi rumah tangga dan inflasi untuk melihat perbedaan kondisi sebelum dan sesudah kenaikan tarif PPN. Sementara itu, analisis regresi menggunakan data dalam bentuk pertumbuhan (growth) untuk melihat pengaruh perubahan tarif PPN terhadap konsumsi rumah tangga dan inflasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada konsumsi rumah tangga dan inflasi sebelum dan sesudah kenaikan tarif PPN 11% pada tingkat signifikansi 10%. Hasil regresi linier sederhana menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN tidak berpengaruh signifikan terhadap konsumsi rumah tangga, namun berpengaruh signifikan terhadap inflasi pada tingkat signifikansi 10%. Temuan ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN lebih berdampak terhadap perubahan tingkat inflasi dibandingkan terhadap konsumsi rumah tangga. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa konsumsi masyarakat Indonesia cenderung tetap stabil meskipun terjadi kenaikan tarif PPN karena konsumsi masyarakat masih didominasi oleh kebutuhan primer yang bersifat inelastis.

Kata kunci: Inflasi; Kebijakan Fiskal; Kenaikan Tarif Pajak; Konsumsi Rumah Tangga; Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1. LATAR BELAKANG

Konsumsi rumah tangga merupakan salah satu komponen utama dalam perekonomian Indonesia karena memiliki kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Tingginya tingkat konsumsi masyarakat menunjukkan bahwa aktivitas pengeluaran rumah tangga menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan, konsumsi

masyarakat menyumbang lebih dari 50% terhadap PDB Indonesia sehingga perubahan pada tingkat konsumsi akan sangat memengaruhi kondisi perekonomian negara. (Muslim, 2011; Zein et al., 2025)

Tingkat konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Salah satu faktor yang memengaruhi konsumsi masyarakat adalah kebijakan fiskal pemerintah, khususnya kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa yang dibebankan kepada konsumen akhir. Pemerintah Indonesia menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022 dan merencanakan kenaikan menjadi 12% pada tahun 2025 sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat stabilitas fiskal. (Armono et al., 2025; Fadhilah et al., 2025).

Kenaikan tarif PPN berpotensi menyebabkan harga barang dan jasa meningkat karena produsen maupun penyedia jasa akan menyesuaikan harga jual untuk menutupi tambahan beban pajak. Kenaikan harga tersebut dapat menurunkan daya beli masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih selektif dalam melakukan konsumsi, terutama terhadap barang dan jasa non-esensial. Penurunan daya beli masyarakat dapat berdampak pada menurunnya tingkat konsumsi rumah tangga yang pada akhirnya memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. (Subur & Syata, 2025).

Selain PPN, inflasi juga menjadi faktor penting yang memengaruhi konsumsi rumah tangga. Inflasi merupakan kondisi meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Ketika inflasi meningkat, kemampuan masyarakat dalam membeli barang dan jasa akan menurun karena pendapatan yang dimiliki tidak mampu mengimbangi kenaikan harga. Akibatnya, masyarakat cenderung mengurangi pengeluaran konsumsi dan lebih memprioritaskan kebutuhan pokok. (Fadhilah et al., 2025)

Kenaikan tarif PPN juga memiliki hubungan dengan inflasi karena peningkatan pajak konsumsi dapat mendorong kenaikan harga barang dan jasa di pasar. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN memberikan dampak terhadap inflasi melalui peningkatan indeks harga konsumen (IHK). Meskipun dampaknya cenderung bersifat jangka pendek, kenaikan inflasi tetap dapat memengaruhi pola konsumsi masyarakat dan daya beli rumah tangga.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas dampak kenaikan PPN terhadap inflasi maupun konsumsi rumah tangga secara terpisah. Namun, penelitian ini memiliki fokus pada perbandingan kondisi konsumsi rumah tangga dan inflasi sebelum dan sesudah kenaikan tarif PPN 11% serta pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap kedua variabel tersebut di Indonesia selama periode 2019–2025. Kenaikan tarif PPN berpotensi meningkatkan harga barang dan

jasa sehingga dapat memengaruhi tingkat inflasi dan pola konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui perbedaan konsumsi rumah tangga dan inflasi sebelum dan sesudah kenaikan tarif PPN 11% serta melihat pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap konsumsi rumah tangga dan inflasi di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa kenaikan tarif PPN dan inflasi memiliki keterkaitan dengan perubahan tingkat konsumsi rumah tangga di Indonesia. Kenaikan harga barang dan jasa akibat kebijakan perpajakan dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan pola pengeluaran rumah tangga. Namun, dalam kondisi tertentu konsumsi masyarakat tetap dapat meningkat karena kebutuhan pokok bersifat inelastis dan didukung oleh pemulihan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perbedaan konsumsi rumah tangga dan inflasi sebelum dan sesudah kenaikan tarif PPN menggunakan uji beda, serta menganalisis pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap konsumsi rumah tangga dan inflasi menggunakan regresi linier sederhana.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional serta pengelolaan perekonomian. Selain sebagai sumber pendapatan negara, pajak juga digunakan sebagai instrumen kebijakan fiskal bersifat mandatory untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2024).

Pajak juga memiliki beberapa fungsi utama dalam perekonomian. Menurut (Gischa, 2024) fungsi pajak terdiri atas fungsi anggaran (*budgetair*), fungsi mengatur (*regulerend*), fungsi pemerataan, dan fungsi stabilisasi. Fungsi anggaran berarti pajak digunakan sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Fungsi mengatur menunjukkan bahwa pajak dapat digunakan sebagai alat kebijakan ekonomi dan sosial. Fungsi pemerataan berkaitan dengan distribusi pendapatan yang lebih adil, sedangkan fungsi stabilisasi bertujuan menjaga kestabilan ekonomi nasional.

Teori Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN merupakan pajak yang pemungutannya diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak dan dikenakan atas konsumsi barang maupun jasa di dalam negeri. Sebagai pajak atas konsumsi, PPN memiliki cakupan yang luas sehingga menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang penting.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, PPN termasuk dalam klasifikasi pajak objektif, yaitu pajak yang dikenakan berdasarkan objek pajaknya tanpa memperhatikan kondisi subjek pajak. Selain itu, PPN juga termasuk pajak tidak langsung karena beban pajak pada akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir, sedangkan pihak yang memungut, menyeter, dan melaporkan pajak adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Objek utama pengenaan PPN adalah Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).

Sebagai pajak atas konsumsi, perubahan tarif PPN berpotensi mempengaruhi harga barang dan jasa di pasar. Kenaikan tarif PPN dapat meningkatkan harga jual produk, menurunkan daya beli masyarakat, serta mempengaruhi tingkat inflasi. Oleh karena itu, kebijakan perubahan tarif PPN menjadi isu penting dalam perekonomian Indonesia dan relevan untuk dikaji lebih lanjut.

Teori Konsumsi Rumah Tangga dan Daya Beli

Konsumsi rumah tangga didefinisikan sebagai pengeluaran unit keluarga untuk memenuhi kebutuhan akhir, baik berupa barang maupun jasa. Dalam konteks ekonomi makro di Indonesia, sektor ini merupakan kontributor terbesar sekaligus tulang punggung dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB). Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian (Oktaria et al., 2025), stabilitas ekonomi nasional sangat bergantung pada tingkat konsumsi masyarakat; apabila konsumsi melemah, maka pertumbuhan ekonomi cenderung akan mengalami stagnasi.

Secara teoritis, landasan utama perilaku konsumsi merujuk pada Absolute Income Hypothesis yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes. Dalam karyanya *The General Theory of Employment, Interest and Money*, Keynes menyatakan bahwa pendapatan disposabel (Y_d) adalah faktor penentu utama konsumsi. Fungsi konsumsi $C = a + bY_d$ menunjukkan bahwa setiap kebijakan fiskal yang menambah beban masyarakat, seperti kenaikan tarif PPN dari 10% ke 11% hingga menjadi 12%, secara matematis akan mengurangi sisa pendapatan yang dapat dibelanjakan. Pengurangan ini menyebabkan terjadinya kontraksi pada daya beli dan konsumsi (*purchasing power*), di mana nilai riil dari uang yang dipegang masyarakat menurun dibandingkan harga barang di pasar.

Kenaikan tarif PPN meningkatkan harga jual barang dan jasa konsumsi. Produk yang semula dikenakan PPN 10% akan mengalami penyesuaian harga ketika tarif naik menjadi 11%. Meskipun selisih 1% terlihat kecil namun dapat menurunkan kemampuan konsumsi masyarakat, terutama di masyarakat kelompok berpenghasilan rendah. Dampak dari penurunan konsumsi dan daya beli ini tidak dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, tetapi juga pada perekonomian secara keseluruhan. Dampak ini juga lebih dirasakan oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, yang cenderung lebih sensitif terhadap kenaikan

harga karena sebagian besar pendapatan mereka dialokasikan untuk kebutuhan pokok. Kenaikan tarif PPN meningkatkan harga barang dan jasa, mulai dari kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, hingga barang non-esensial seperti elektronik. Masyarakat mungkin merespons kenaikan ini dengan mengurangi konsumsi barang-barang yang dianggap kurang penting dan hanya fokus pada kebutuhan pokok.

Studi-studi empiris menunjukkan bahwa kenaikan PPN cenderung menurunkan konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50% terhadap PDB Indonesia, sehingga penurunan konsumsi dapat berdampak signifikan pada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan studi empiris oleh (Febrianto, 2025), kenaikan PPN menciptakan tekanan asimetris yang jauh lebih berat bagi rumah tangga kelompok menengah ke bawah.

Teori Inflasi

Inflasi didefinisikan sebagai fenomena kenaikan harga barang dan jasa secara umum, luas, dan berlangsung secara terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Berdasarkan (Bank Indonesia, 2020), inflasi bukan sekadar kenaikan harga satu atau dua barang secara insidental, melainkan mencakup kenaikan harga yang menjalar secara sistemik sehingga menyebabkan penurunan nilai mata uang dalam daya tukarnya terhadap komoditas pasar. Stabilitas harga merupakan syarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Sebaliknya, inflasi yang tidak terkendali akan mendistorsi alokasi sumber daya ekonomi dan menurunkan kesejahteraan riil masyarakat.

Teori ekonomi Keynesian menjelaskan bahwa inflasi dapat muncul karena dorongan masyarakat untuk mengkonsumsi melebihi kemampuan yang mereka miliki. Hal ini menyebabkan permintaan terhadap barang dan jasa menjadi lebih besar dibandingkan ketersediaannya, Nur, (2024) menerangkan bahwa John Maynard Keynes pada tahun 1930 mengatakan hal tersebut dapat memicu kenaikan.

Berdasarkan Bank Indonesia (2026) inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga umum yang berlangsung secara terus-menerus dalam perekonomian, bukan sekadar kenaikan harga sesaat pada beberapa komoditas saja. Inflasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti meningkatnya jumlah uang beredar yang mendorong daya beli masyarakat, tingginya permintaan agregat yang tidak diimbangi oleh kemampuan produksi, serta kenaikan biaya produksi seperti upah tenaga kerja atau harga bahan baku.

Secara teoritis, jika dikaitkan dengan kebijakan kenaikan tarif PPN (dari 10%, 11%), fenomena ini diklasifikasikan ke dalam beberapa sudut pandang ekonomi makro yang mendalam seperti:

a. Cost-Push Inflation (Inflasi Dorongan Biaya)

Dalam buku "Teori Inflasi dan Pendapatan" karya Dewi Mahrani Rangkuty et al., dijelaskan bahwa inflasi jenis ini muncul akibat kenaikan biaya input atau beban pajak di sisi hulu (produksi) yang kemudian dialihkan oleh produsen kepada konsumen. PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap mata rantai distribusi. Ketika tarif PPN naik, terjadi mekanisme *tax shifting* (pergeseran beban pajak), di mana pelaku usaha akan menaikkan harga jual akhir guna mempertahankan margin keuntungan mereka. Akibatnya, Indeks Harga Konsumen (IHK) akan mengalami lonjakan sebagai representasi dari kenaikan biaya hidup.

b. Dampak terhadap Pendapatan Riil dan Daya Beli

Inflasi yang dipicu oleh kenaikan pajak secara sistematis menggerus daya beli riil masyarakat. Merujuk pada analisis Sangkala (2025), kenaikan harga akibat PPN menciptakan "*Inflationary Shock*" yang bersifat regresif. Artinya, inflasi ini memberikan beban yang secara proporsional lebih berat bagi kelompok berpendapatan rendah. Hal ini terjadi karena laju inflasi seringkali tidak dibarengi dengan kenaikan pendapatan nominal (upah) yang sepadan, sehingga pendapatan riil masyarakat menurun. Ketika harga barang naik sementara uang yang dimiliki tetap, kuantitas barang yang dapat dikonsumsi rumah tangga secara otomatis akan berkurang.

c. Ekspektasi Inflasi dan Perilaku Antisipatif

Aspek krusial lainnya adalah peran Ekspektasi Inflasi. Sebagaimana dicatat oleh Saefulloh et. al (2023) dalam Jurnal Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, inflasi seringkali terjadi bahkan sebelum kebijakan fiskal tersebut diimplementasikan secara resmi. Pengumuman rencana kenaikan PPN menjadi 12% di tahun 2025 dapat memicu "ekspektasi negatif" di masyarakat dan pelaku usaha. Pelaku usaha mungkin akan melakukan penyesuaian harga lebih awal untuk mengantisipasi kenaikan biaya di masa depan, sementara masyarakat mungkin melakukan aksi beli secara berlebihan (*panic buying*) di masa sekarang, yang justru mendorong harga naik lebih cepat di tingkat retail.

d. Hubungan Inflasi dengan Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan studi Oktaria et al., (2025), inflasi yang tinggi akibat tekanan pajak dapat menghambat momentum pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Konsumsi rumah tangga adalah motor penggerak utama ekonomi Indonesia; jika inflasi menekan konsumsi, maka permintaan agregat akan menurun, yang pada gilirannya akan memaksa sektor industri untuk menurunkan kapasitas produksinya. Oleh karena itu, pengendalian inflasi

akibat kebijakan fiskal menjadi sangat vital agar tidak terjadi *trade-off* yang ekstrim antara target penerimaan negara dan kesejahteraan konsumsi masyarakat.

Keterkaitan PPN, Konsumsi Rumah Tangga, dan Inflasi

Hubungan kausalitas antara kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dinamika inflasi, dan kekuatan daya beli masyarakat merupakan satu kesatuan transmisi ekonomi yang saling berinteraksi secara sistemik. Secara fundamental, rencana kenaikan tarif PPN dari 11% menuju 12% bertindak sebagai variabel gangguan yang secara langsung mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen. Berdasarkan perspektif makro ekonomi (Rangkuty, 2024), kebijakan ini memicu *cost-push inflation* melalui mekanisme tax shifting, dimana produsen mengalihkan beban pajak tambahan ke dalam harga jual. Alur ini menjelaskan mengapa setiap kenaikan tarif PPN selalu diikuti dengan lonjakan Indeks Harga Konsumen (IHK); saat PPN naik, maka harga barang secara umum ikut naik, yang pada akhirnya memaksa masyarakat untuk mengurangi volume belanja sehingga konsumsi rumah tangga menurun.

Di sisi lain, lonjakan harga tersebut menciptakan tekanan inflasi yang secara linear menggerus nilai riil pendapatan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam analisis (Sangkala, 2025), kenaikan PPN menciptakan "*Inflationary Shock*" yang bersifat regresif, di mana tekanan ekonomi terasa lebih berat bagi kelompok pendapatan rendah. Fenomena ini menunjukkan bahwa saat inflasi naik, maka daya beli (*purchasing power*) masyarakat akan turun karena jumlah uang yang sama tidak lagi mampu membeli jumlah barang yang sama seperti sebelumnya. Kondisi daya beli yang melemah ini, menurut studi Febrianto, (2025), memaksa rumah tangga melakukan realokasi anggaran yang ketat, yang kembali berujung pada penurunan konsumsi rumah tangga secara agregat.

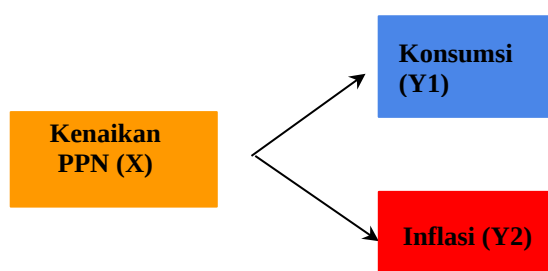
Keterkaitan ketiga aspek ini bermuara pada stabilitas ekonomi nasional. Sebagaimana ditekankan oleh (Oktaria et al., 2025), karena konsumsi rumah tangga adalah motor penggerak utama Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, maka pelemahan daya beli akibat inflasi pajak dapat menghambat momentum pertumbuhan ekonomi secara makro. Dengan demikian, hubungan antara PPN, daya beli, dan inflasi membentuk sebuah siklus ketergantungan di mana kenaikan tarif pajak yang tidak terukur berisiko menciptakan efek domino yang melumpuhkan aktivitas ekonomi di sektor riil.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis deskriptif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis secara objektif hubungan antara perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

dari 10% menjadi 11% terhadap konsumsi rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan kebijakan PPN 12% pada barang mewah untuk melihat implikasinya terhadap konsumsi secara agregat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber resmi, seperti publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya dalam laporan PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran periode 2019-2025. Data Inflasi bersumber dari laporan inflasi bulanan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) yang selanjutnya diolah kembali menjadi data triwulanan untuk menyesuaikan dengan periode penelitian. Data Kebijakan Fiskal terkait kebijakan kenaikan tarif PPN diambil dari publikasi resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia.



Gambar 1. Kerangka Konsep

Tabel 1. Definisi Operasional

No	Variabel	Sub Variabel	Indikator Pengukuran	Satuan	Sumber Data
1	Tarif PPN (X)	Kenaikan Tarif PPN	Dummy Variabel (0 = periode PPN 10% (2019 - TW I 2022), 1 = periode PPN 11% (TW II 2022 – 2025	Dummy	Kementerian Keuangan RI (2022)
2	Konsumsi Rumah Tangga (Y1)	Pengeluaran Konsumsi	Nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga per triwulan (PDB pengeluaran) yang telah dibagi 1.000.000	Juta Rupiah	BPS (2019-2025)
3	Inflasi (Y2)	Tingkat Inflasi	Tingkat inflasi per triwulan (hasil pengolahan dari data bulanan	Persen (%)	Bank Indonesia (2019-2025)

Penelitian ini menggunakan satu variabel independen dan dua variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sedangkan variabel dependennya terdiri dari konsumsi rumah tangga dan inflasi. Hubungan antarvariabel dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif PPN dari 10% menjadi 11% terhadap konsumsi rumah tangga dan tingkat inflasi di Indonesia.

Variabel kenaikan tarif PPN (X) diukur menggunakan variabel dummy, yaitu nilai 0 untuk periode sebelum kenaikan tarif PPN 11% (2019–Triwulan I 2022) dan nilai 1 untuk periode setelah kenaikan tarif PPN 11% (Triwulan II 2022–2025). Penggunaan variabel dummy dilakukan untuk membedakan kondisi sebelum dan sesudah kebijakan kenaikan tarif PPN diterapkan.

Variabel konsumsi rumah tangga (Y1) diukur menggunakan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per triwulan yang diperoleh dari Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan pendekatan pengeluaran yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data disajikan dalam satuan juta rupiah agar mempermudah proses analisis penelitian.

Sementara itu, variabel inflasi (Y2) diukur menggunakan tingkat inflasi per triwulan dalam bentuk persentase yang diperoleh dari publikasi Bank Indonesia. Data inflasi bulanan kemudian diolah menjadi data triwulanan agar sesuai dengan periode penelitian dan memudahkan proses pengujian statistik.

Populasi dalam penelitian ini adalah data konsumsi rumah tangga dan inflasi di Indonesia. Sampel yang digunakan berupa data *time series* periode 2019-2025 dengan frekuensi triwulanan. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan ketersediaan data yang relevan dengan tujuan penelitian.

Data pada penelitian ini dianalisis melalui beberapa tahap, yakni:

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai perkembangan konsumsi rumah tangga dan inflasi sebelum dan sesudah kenaikan tarif PPN. Periode 2019- triwulan 1 2022 dikategorikan sebagai sebelum kenaikan PPN (10%), sedangkan periode triwulan II 2022-2025 sebagai sesudah kenaikan PPN (11%). Statistik yang digunakan meliputi nilai rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dilakukan menggunakan *uji Jarque-Bera* pada aplikasi EViews dengan tingkat signifikansi 10% (0,10). Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,10 maka data dinyatakan berdistribusi normal, sedangkan jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,10 maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal.

Uji Beda (Independent Sample t-test)

Uji beda digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan konsumsi rumah tangga dan inflasi antara periode sebelum dan sesudah kenaikan tarif PPN 11%. Pengujian dilakukan menggunakan *Independent Sample t-test* dengan tingkat signifikansi 10% (0,10).

Apabila nilai probabilitas (*p-value*) lebih kecil dari 0,10 maka terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua periode penelitian. Pada pengujian ini digunakan data asli konsumsi rumah tangga dan inflasi agar perbedaan kondisi sebelum dan sesudah kenaikan tarif PPN dapat terlihat secara langsung.

Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menguji pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap konsumsi rumah tangga dan inflasi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kenaikan tarif PPN yang diukur menggunakan variabel dummy, yaitu nilai 0 untuk periode PPN 10% dan nilai 1 untuk periode PPN 11%. Dalam analisis regresi, data konsumsi rumah tangga dan inflasi ditransformasikan ke dalam bentuk pertumbuhan (*growth*). Transformasi data dilakukan untuk melihat perubahan atau laju pertumbuhan variabel dari satu periode ke periode berikutnya sehingga hubungan antarvariabel dapat dianalisis dengan lebih jelas. Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

Untuk konsumsi rumah tangga : $Y_1 = a + BX + e$(I)

Untuk inflasi : $Y_2 = a + BX + e$(II)

Keterangan:

Y_1 = Konsumsi rumah tangga

Y_2 = Inflasi

X = Kenaikan tarif PPN (dummy)

a = Konstanta

β = Koefisien regresi

e = Error term

Pengujian dilakukan dengan melihat nilai koefisien regresi dan tingkat signifikansi (*p-value*). Jika nilai *p-value* < 0,10, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Teknik Pengolahan Data

Data dalam penelitian ini diolah menggunakan perangkat lunak *Microsoft Excel* dan *Eviews*. Tahapan pengolahan data meliputi pengumpulan data, perhitungan statistik deskriptif serta pengujian regresi linier dan uji asumsi klasik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Row Labels	Average of Konsumsi	StdDev of Konsumsi	Min of Konsumsi	Max of Konsumsi	Average of Inflasi	StdDev of Inflasi	Min of Inflasi	Max of Inflasi
PPN 10%	2.271.035	79.933	133.196	421.650	2,21%	0,72%	1,42%	3,40%
PPN 11%	2.910.053	244.223	532.660	296.788	3,08%	1,42%	0,62%	5,54%
Grand Total	2.613.366	372.952	133.196	296.788	2,68%	1,21%	0,62%	5,54%

Berdasarkan tabel statistik deskriptif, rata-rata konsumsi pada periode PPN 11% lebih tinggi dibandingkan periode PPN 10%. Selain itu, rata-rata inflasi pada periode PPN 11% juga menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya perubahan kondisi konsumsi dan inflasi antara periode penerapan PPN 10% dan PPN 11%. Namun, hasil statistik deskriptif ini hanya menggambarkan kondisi data secara umum dan belum menunjukkan adanya pengaruh signifikan antar variabel.

Tabel 3. Uji Normalitas

Variabel	Probability Jarque-Bers	Keterangan
Konsumsi	0.278603	Normal
Inflasi	0.175813	Normal

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan *Jarque-Bera Test*, variabel konsumsi rumah tangga memperoleh nilai probabilitas sebesar 0.278603 dan variabel inflasi sebesar 0.175813. Kedua variabel memiliki nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi 10% (0,10), sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Karena data berdistribusi normal, maka pengujian hipotesis dilanjutkan menggunakan *Independent Sample T-Test*.

Tabel 4. Hasil Uji Beda (t-statistik)

Variabel	t-Statistik	Probabilitas	Keterangan
Konsumsi Rumah Tangga	-9.005599	0.0001	Signifikan ($p < 0.1$)
Inflasi	-1.980605	0.0583	Signifikan ($p < 0.1$)

Berdasarkan hasil uji beda (*Independent Sample t-test*), variabel konsumsi rumah tangga memperoleh nilai t-statistic sebesar -9.005599 dengan probabilitas sebesar 0.0001. Nilai probabilitas yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 10% (0,10) menunjukkan bahwa terdapat

perbedaan yang signifikan pada konsumsi rumah tangga sebelum dan sesudah kenaikan tarif PPN 11%.

Sementara itu, variabel inflasi memperoleh nilai t-statistic sebesar -1.980605 dengan probabilitas sebesar 0.0583. Nilai probabilitas yang lebih kecil dari $\alpha = 10\%$ menunjukkan bahwa inflasi juga mengalami perbedaan signifikan sebelum dan sesudah kenaikan tarif PPN.

Tabel 5. Hasil Regresi Linier Sederhana

Variabel	R-square	F-Statistik	Koefisien	Probabilitas	Keterangan
Konsumsi	0.052586	1.387623	1.056106	0.2499	Tidak Signifikan ($p < 0.1$)
Inflasi	0.131097	3.922797	0.864359	0.0583	Signifikan ($p < 0.1$)

Hasil regresi linier sederhana menunjukkan bahwa variabel dummy PPN terhadap growth konsumsi rumah tangga memiliki nilai probabilitas sebesar 0.2499. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 10% (0,10), sehingga menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 11% tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Indonesia selama periode penelitian.

Sementara itu, hasil regresi pada variabel inflasi menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.0583, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 10% (0,10). Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 11% berpengaruh signifikan terhadap tingkat inflasi di Indonesia.

Pembahasan

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, rata-rata konsumsi rumah tangga pada periode PPN 11% lebih tinggi dibandingkan periode PPN 10%. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga masyarakat Indonesia tetap mengalami peningkatan meskipun terjadi kenaikan tarif PPN. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas konsumsi masyarakat masih relatif stabil selama periode penelitian.

Selain itu, rata-rata tingkat inflasi pada periode PPN 11% juga lebih tinggi dibandingkan periode PPN 10%. Peningkatan ini menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa setelah kebijakan kenaikan tarif PPN diterapkan. Kenaikan tarif PPN sebagai pajak konsumsi berpotensi meningkatkan harga jual barang dan jasa sehingga mendorong peningkatan inflasi.

Meskipun rata-rata konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan, hasil tersebut menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN belum secara langsung menurunkan tingkat konsumsi masyarakat. Hal ini dapat dipengaruhi oleh masih tingginya kebutuhan konsumsi rumah tangga terhadap barang-barang primer serta adanya pemulihan aktivitas ekonomi pasca pandemi yang turut mendorong peningkatan konsumsi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kenaikan tarif PPN tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap konsumsi rumah tangga di Indonesia pada tingkat signifikansi 10%. Hal ini terlihat dari hasil regresi linier sederhana dimana variabel dummy kenaikan tarif PPN terhadap konsumsi rumah tangga memiliki nilai probabilitas sebesar 0,2499 yang lebih besar dari $\alpha = 10\%$ (0,10). Temuan ini menunjukkan bahwa secara individual kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% belum mampu memberikan pengaruh yang kuat terhadap konsumsi rumah tangga selama periode penelitian. Sementara itu, variabel inflasi menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0583 yang lebih kecil dari $\alpha = 10\%$, sehingga inflasi memiliki pengaruh signifikan selama periode penelitian.

Meskipun demikian, hasil uji beda (Independent Sample t-test) menunjukkan adanya perbedaan signifikan pada konsumsi rumah tangga sebelum dan sesudah kenaikan tarif PPN, dengan nilai probabilitas sebesar 0,0001. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi rumah tangga mengalami perubahan setelah kebijakan kenaikan tarif PPN diterapkan. Namun, perubahan tersebut tidak cukup kuat untuk menunjukkan hubungan pengaruh secara signifikan dalam model regresi yang digunakan.

Perbedaan hasil antara uji beda dan regresi linier sederhana dapat terjadi karena kedua metode memiliki tujuan pengujian yang berbeda. Uji beda digunakan untuk melihat adanya perbedaan rata-rata konsumsi rumah tangga sebelum dan sesudah kenaikan tarif PPN, sedangkan regresi linier sederhana digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap growth konsumsi rumah tangga. Dengan demikian, meskipun terdapat perubahan rata-rata konsumsi antar periode, perubahan tersebut belum tentu sepenuhnya dipengaruhi secara langsung oleh kenaikan tarif PPN karena konsumsi rumah tangga juga dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi lainnya, seperti pendapatan masyarakat, pemulihan ekonomi pasca pandemi, kondisi pasar kerja, dan tingkat kebutuhan konsumsi rumah tangga.

Secara teoritis, kenaikan tarif PPN dapat meningkatkan harga barang dan jasa sehingga berpotensi menurunkan daya beli masyarakat. Kenaikan harga akibat pajak konsumsi juga dapat memengaruhi pola pengeluaran rumah tangga, terutama pada kelompok masyarakat yang sensitif terhadap perubahan harga. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga di Indonesia cenderung tetap stabil meskipun terjadi kenaikan tarif PPN menjadi 11%.

Secara teori, kenaikan pajak konsumsi seperti PPN akan meningkatkan harga barang dan jasa sehingga berpotensi menurunkan daya beli masyarakat. Dalam teori permintaan yang dikemukakan oleh (Febrianto et al., 2025), kenaikan harga akan menyebabkan jumlah barang yang diminta menurun (law of demand). Namun, hasil empiris penelitian menunjukkan bahwa

konsumsi rumah tangga di Indonesia tetap cenderung stabil meskipun terjadi kenaikan tarif PPN menjadi 11%. Hal ini dapat terjadi karena sebagian besar konsumsi masyarakat Indonesia masih didominasi oleh kebutuhan primer yang bersifat inelastis seperti makanan, transportasi, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, sehingga masyarakat tetap melakukan konsumsi meskipun harga mengalami kenaikan.

Dalam perspektif makroekonomi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga sebagai komponen utama permintaan agregat masih mampu bertahan di tengah perubahan kebijakan fiskal. Selain itu, pemulihan aktivitas ekonomi pasca pandemi dan meningkatnya mobilitas masyarakat turut mendorong stabilitas konsumsi domestik. Temuan ini sejalan dengan teori konsumsi Keynesian yang menyatakan bahwa konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh pendapatan disposabel. Meskipun kenaikan tarif PPN meningkatkan beban pengeluaran masyarakat, konsumsi tetap berjalan karena masyarakat berusaha mempertahankan pemenuhan kebutuhan pokoknya.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0,0583 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 10% (0,10). Koefisien regresi sebesar 0,864359 menunjukkan adanya hubungan positif antara kenaikan tarif PPN dan inflasi, yang berarti tingkat inflasi cenderung meningkat setelah kebijakan kenaikan tarif PPN diterapkan.

Peningkatan inflasi tersebut dapat dijelaskan melalui mekanisme kenaikan harga barang dan jasa akibat bertambahnya beban pajak konsumsi. Ketika tarif PPN meningkat, pelaku usaha cenderung menyesuaikan harga jual untuk menjaga margin keuntungan, sehingga terjadi kenaikan harga di tingkat konsumen. Kondisi ini sejalan dengan teori cost-push inflation yang menjelaskan bahwa kenaikan biaya produksi atau beban pajak dapat mendorong peningkatan inflasi.

Meningkatnya inflasi akibat kenaikan tarif PPN juga berpotensi menurunkan daya beli masyarakat karena pendapatan riil menjadi berkurang. Akan tetapi, dalam penelitian ini penurunan daya beli tersebut belum mampu menekan konsumsi rumah tangga secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih berusaha mempertahankan tingkat konsumsi, khususnya untuk kebutuhan pokok, meskipun terjadi tekanan harga di pasar.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan tarif PPN memiliki dampak yang lebih kuat terhadap inflasi dibandingkan terhadap konsumsi rumah tangga. Temuan ini mengindikasikan bahwa perubahan tarif PPN lebih cepat tercermin pada kenaikan harga barang dan jasa, sementara pengaruhnya terhadap konsumsi masyarakat

cenderung terjadi secara bertahap dan dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi lainnya seperti pendapatan, kondisi pasar kerja, dan tingkat kebutuhan masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap konsumsi rumah tangga dan inflasi di Indonesia periode 2019–2025, dapat disimpulkan bahwa hasil uji beda menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan pada konsumsi rumah tangga dan inflasi sebelum dan sesudah kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11%. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas konsumsi rumah tangga sebesar 0,0001 dan inflasi sebesar 0,0583 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 10%.

Hasil regresi linier sederhana menunjukkan bahwa variabel kenaikan tarif PPN tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap konsumsi rumah tangga. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas sebesar 0,2499 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 10%. Meskipun demikian, koefisien regresi menunjukkan hubungan positif antara perubahan tarif PPN dan konsumsi rumah tangga. Sementara itu, kenaikan tarif PPN memiliki pengaruh signifikan terhadap inflasi dengan nilai probabilitas sebesar 0,0583 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 10%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kenaikan tarif PPN turut mendorong peningkatan inflasi selama periode penelitian.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN belum mampu menurunkan konsumsi rumah tangga secara signifikan karena masyarakat tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pokok. Namun, kebijakan kenaikan tarif PPN tetap memberikan dampak terhadap peningkatan tingkat inflasi di Indonesia. Dengan demikian, pemerintah perlu menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat agar dampak kebijakan perpajakan terhadap kondisi ekonomi dapat tetap terkendali.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmed, A., & G. (2024). *Basic econometrics*. McGraw-Hill Education.
- Armono, D., Ikhsan, N., Aftika, W., & Setiana, N. (2025). Evaluasi kebijakan kenaikan PPN: Pengaruh terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (studi literatur). 22(1), 721–729.
- Bank Indonesia. (2020). *Data inflasi*. <https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/data-inflasi.aspx>
- Bank Indonesia. (2020). *Inflasi*. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/inflasi/Default.aspx>
- Bank Indonesia. (2026). *Inflasi*.

- Badan Pemeriksa Keuangan. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/311485/pmk-no-131-tahun-2024>
- Badan Pusat Statistik. (2023). [Seri 2010] PDB triwulanan atas dasar harga konstan menurut pengeluaran. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk1NiMy/-seri-2010--2--pdb-triwulanan-atas-dasar-harga-konstan-menurut-pengeluaran--milyar-rupiah-.html>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2009). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009*. <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-42-tahun-2009>
- Dornbusch, R. (2011). *Macroeconomics* (11th ed.). McGraw-Hill.
- Fadhilah, A., Fitriani, S. D., & Enjellika, J. Z. (2025). Pengaruh kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap inflasi di Indonesia. *10*(1), 63–74.
- Febrianto, F. (2025). Analisis konsumsi rumah tangga kelompok pendapatan menengah-bawah terhadap kenaikan tarif PPN di Jakarta. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, *5*(1), 863–872. <https://doi.org/10.56799/peshum.v5i1.13144>
- Gischa, S. (2024, September 9). *4 fungsi pajak dan penjelasannya*. Kompas.com. <https://www.kompas.com/skola/read/2024/09/09/180000169/4-fungsi-pajak-dan-penjasannya>
- Mardiasmo. (2024). *Perpajakan* (Edisi terbaru). ANDI.
- Meiditambua Saefulloh, M. H., Fahlevi, M. R., & C. S. A. (2023). Pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)*, *13*(3), 17–26. <https://doi.org/10.35508/jom.v13i3.3311>
- Muslim, A. (2011). Peranan konsumsi dalam perekonomian Indonesia dan kaitannya dengan ekonomi Islam. *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, *1*(2), 70–82.
- Nur, R. (2024). *Pengertian pajak menurut para ahli*. Universitas Wira Buana. <https://wirabuana.ac.id/artikel/pengertian-pajak-menurut-para-ahli-2/>
- Oktaria, V., Rofiqi, F. K., Nuraini, C., & Syahrani, A. R. S. W. E. (2025). Analisis pengaruh konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, investasi, ekspor, dan impor terhadap produk domestik bruto di Indonesia. *3*(11).
- Pettinger, T. (2019). *Consumption function definition*. Economics Help. <https://www.economicshelp.org/blog/glossary/consumption-function/>
- Rangkuty, D. M. (2024). *Teori inflasi dan pendapatan*. Tahta Media Group.
- Sangkala, M. (2025). Analisis dampak pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap konsumsi rumah tangga. *5*(3), 34415–34419.
- Subur, H., & Syata, W. M. (2025). Analisis dampak kenaikan tarif pajak pertambahan nilai. *1*(5), 205–210.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia* (10th ed., Vol. 2). Salemba Empat.
- Zein, A. W., Andini, A., & Sinka, V. (2025). Dampak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap konsumsi rumah tangga menengah: Studi empiris di kota besar. *Journal of Economic and Public Policy*, *2*(3). <https://doi.org/10.61132/jeap.v2i3.1045>